

Received: 18-07-2025 | Published: 07-08-2025

STRATEGI EFEKTIVITAS AKSI KONVERGENSI INTEGRASI
STUNTING DI WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA

Muhammad Nasir

Bapperida Kabupaten Aceh Jaya

E-mail : nasser.teunom@gmail.com

ABSTRACT

The slow progress of stunting reduction in Aceh Jaya Regency is not due to a lack of programs, but to fundamental governance issues. This policy paper aims to analyze the root cause of this problem and formulate the most effective and implementable policy strategy. By employing a quantitative SWOT analysis (IFE/EFE Matrix) and William Dunn's policy evaluation criteria, this study dissects the issue from the surface level down to the bureaucratic work system. The findings reveal that the primary issue is a **systemic weakness in inter-sectoral coordination**, placing the program in a vulnerable Quadrant III (Weaknesses-Threats) position. This governance failure manifests as sectoral ego, non-data-driven planning, and uneven service distribution. Therefore, the most logical and strategic intervention is not to introduce new programs, but to issue a **Regent Regulation (Peraturan Bupati) on Integrated Stunting Reduction Acceleration**. This regulation is recommended to legally mandate four key pillars: (1) an institutionalized mandatory coordination mechanism; (2) an integrated planning and budgeting process based on a single data source; (3) a unified digital monitoring and evaluation platform; and (4) a clear incentive and disincentive system for Regional Work Units (OPD). This policy offers a robust, swift, and realistic solution to create tangible synergy on the ground.

Keywords: *Stunting Convergence, Governance, Public Policy, Regent Regulation, Aceh Jaya.*

Abstrak

Penurunan stunting di Kabupaten Aceh Jaya berjalan lambat bukan karena kurangnya program, melainkan akibat persoalan tata kelola yang fundamental. Kajian kebijakan ini bertujuan untuk menganalisis akar masalah tersebut dan merumuskan strategi kebijakan yang paling efektif dan dapat diimplementasikan. Dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT yang terukur (Matriks IFE/EFE) dan kriteria evaluasi kebijakan William Dunn, kajian ini membongkar masalah dari level permukaan hingga ke sistem kerja birokrasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa masalah utama adalah **lemahnya koordinasi antar sektor yang bersifat sistemik**, menempatkan program pada posisi Kuadran III (Kelemahan-Ancaman) yang rentan. Ego sektoral, perencanaan yang tidak berbasis data, dan distribusi layanan yang timpang menjadi manifestasi utama dari kegagalan tata kelola ini. Oleh karena itu, intervensi yang paling logis dan strategis bukanlah menambah program baru, melainkan menerbitkan **Peraturan Bupati (Perbup) tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi**. Perbup ini direkomendasikan untuk mengatur secara mengikat empat pilar utama: (1) mekanisme koordinasi wajib yang dilembagakan; (2) proses perencanaan dan penganggaran terpadu berbasis data tunggal; (3) platform monitoring dan evaluasi digital

bersama; serta (4) sistem insentif dan disinsentif yang jelas bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kebijakan ini menawarkan solusi yang kuat, cepat, dan realistis untuk menciptakan sinergi nyata di lapangan.

Kata Kunci: *Konvergensi Stunting, Tata Kelola, Kebijakan Publik, Peraturan Bupati, Aceh Jaya.*

PENDAHULUAN

Kabupaten Aceh Jaya menunjukkan komitmen yang tinggi dalam upaya percepatan penurunan stunting. Komitmen ini terwujud secara kelembagaan melalui pembentukan Sekretariat Bersama Bangkit Generasi Aceh Jaya (Sekber Bangraja) yang telah diperluas keanggotaannya dari 12 menjadi 18 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) pada tahun 2022. Inisiatif ini menandakan adanya kesadaran politik dan birokrasi akan pentingnya pendekatan multisektor. Namun, efektifitas integrasi antar OPD masih terbatas. Beberapa program yang dijalankan oleh OPD sering kali tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga tidak terintegrasi dalam pendekatan holistik yang diinginkan. Data menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah anggota Sekber Bangraja, masih ada gap dalam implementasi program yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Aceh Jaya masih menjadi tantangan utama dalam implementasi aksi konvergensi stunting. Meskipun Sekretariat Bersama Bangkit Generasi Aceh Jaya (Sekber Bangraja) telah dibentuk untuk mengkoordinasikan berbagai sektor, efektifitasnya belum optimal. Hal ini sejalan dengan temuan dalam artikel yang mengungkapkan bahwa koordinasi yang buruk antar sektor dapat menghambat efektifitas kebijakan konvergensi stunting (Supriyanto, 2021).

Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan cakupan layanan, laporan menunjukkan bahwa beberapa kecamatan dan gampong di Kabupaten Aceh Jaya masih mengalami kesenjangan dalam akses terhadap layanan kesehatan dan gizi. Hal ini sejalan dengan temuan dalam artikel yang mencatat bahwa meskipun ada penurunan prevalensi stunting, distribusi layanan belum merata di seluruh wilayah (Amalia et al., 2022). Meskipun Kabupaten Aceh Jaya telah melakukan berbagai intervensi melalui Sekber Bangraja, laporan stunting 2022 menunjukkan bahwa program-program yang ada masih mengalami kesenjangan dalam cakupan layanan, terutama di daerah-daerah tertentu. Hasil pemantauan pada tahun 2020 menunjukkan angka prevalensi stunting yang masih tinggi di beberapa kecamatan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan stunting belum sepenuhnya merata, dengan beberapa kecamatan dan gampong yang menjadi lokasi fokus intervensi masih kesulitan dalam mengakses layanan yang cukup. Misalnya, pada tahun 2020, alokasi anggaran dari Dinas Kesehatan yang sebesar Rp1.126.383.600 dan DPMPKB Rp456.000.000 belum optimal dalam menjangkau semua wilayah yang terindikasi memiliki kasus stunting.

Data yang diperoleh melalui aplikasi Eppgbm menunjukkan bahwa meskipun ada usaha integrasi program oleh OPD terkait, akses terhadap data rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) masih terbatas. Hal ini berdampak pada ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran intervensi gizi spesifik dan sensitif. Di Kabupaten Aceh Jaya, tim teknis melaporkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk mengintegrasikan data, tantangan utama terletak pada pemanfaatan data secara

maksimal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, penguatan sistem informasi dan manajemen data yang lebih terpusat dan terintegrasi menjadi hal yang sangat penting untuk keberhasilan program. Penggunaan data rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam perencanaan dan pelaksanaan program stunting di Kabupaten Aceh Jaya masih terbatas. Hal ini berdampak pada ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran intervensi gizi spesifik dan sensitif. Hal ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dan data yang tepat dapat meningkatkan efektivitas program konvergensi stunting (Wahyudi, 2020).

Hasil kajian mengungkapkan bahwa rapat koordinasi yang diadakan bertujuan untuk mengevaluasi capaian dan menyusun rencana program penurunan stunting, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan, mencatat bahwa perlu adanya perbaikan dalam hal ini (Nasution, 2021). Dalam pelaksanaan program stunting, salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara tingkat kabupaten dengan kecamatan dan gampong. Meskipun sudah ada mekanisme koordinasi melalui forum seperti Sekber Bangraja, laporan menunjukkan bahwa forum-forum tersebut belum efektif dalam memastikan keterlibatan penuh dari seluruh pihak yang relevan. Misalnya, pada tahun 2022, meskipun Sekber Bangraja memiliki anggota dari berbagai OPD, koordinasi antar SKPK dalam hal pelaksanaan program seringkali masih bersifat sektoral, sehingga program yang dilaksanakan belum terkoordinasi secara optimal di tingkat kecamatan dan gampong. Meskipun telah ada forum koordinasi seperti Sekber Bangraja, koordinasi antara tingkat kabupaten dan kecamatan serta gampong masih belum optimal.

Salah satu aspek yang menjadi kendala utama dalam upaya konvergensi adalah masalah alokasi anggaran. Meskipun ada peningkatan alokasi anggaran untuk penurunan stunting, seperti yang tercatat pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp3.590.914.000 dari berbagai OPD, pengelolaan anggaran yang masih belum optimal menyebabkan tidak meratanya distribusi layanan. Sebagai contoh, anggaran untuk Dinas Pangan yang pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp999.400.000 tidak dapat sepenuhnya menyentuh semua desa yang menjadi lokasi fokus, mengingat distribusi anggaran yang belum terfokus pada wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Meskipun ada peningkatan alokasi anggaran untuk penurunan stunting, pengelolaan anggaran yang belum optimal menyebabkan tidak meratanya distribusi layanan. Sebagai contoh, alokasi anggaran dari Dinas Pangan yang pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp999.400.000 tidak dapat sepenuhnya menyentuh semua desa yang menjadi lokasi fokus, mengingat distribusi anggaran yang belum terfokus pada wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi (Sari, 2021).

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting dan bagaimana berpartisipasi dalam program ini membuat program yang ada kurang berdampak. Hal ini diungkapkan dalam artikel yang menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama dalam penanggulangan stunting (Setiawati & Nasution, 2020). Salah satu masalah besar dalam efektivitas aksi konvergensi adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program yang ada. Data menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai intervensi yang dilakukan oleh SKPK, keterlibatan aktif masyarakat dalam program pemberdayaan masih terbatas. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting dan bagaimana berpartisipasi dalam program ini membuat program yang ada kurang berdampak. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang lebih efektif untuk merubah

perilaku masyarakat, serta pendekatan yang lebih berbasis pada pemberdayaan komunitas, perlu diperkuat. Partisipasi aktif masyarakat dalam program stunting di Kabupaten Aceh Jaya masih rendah.

Selain itu, pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif di lapangan mengalami kendala dalam hal ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang memadai. Dalam laporan pemantauan 2022, ditemukan bahwa beberapa wilayah di Aceh Jaya masih kekurangan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan tenaga kesehatan di lapangan. Keterbatasan ini berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada keluarga sasaran, yang pada akhirnya menghambat pencapaian target penurunan stunting. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di tingkat desa menjadi aspek yang sangat penting dalam meningkatkan cakupan intervensi. Pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif di lapangan mengalami kendala dalam hal ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang memadai. Dalam laporan pemantauan 2022, ditemukan bahwa beberapa wilayah di Aceh Jaya masih kekurangan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan tenaga kesehatan di lapangan. Keterbatasan ini berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada keluarga sasaran, yang pada akhirnya menghambat pencapaian target penurunan stunting (Hendrawan, 2022).

Meskipun sudah ada upaya monitoring dan evaluasi melalui aplikasi Eppgbm, hasil laporan menunjukkan bahwa sistem pemantauan yang ada belum optimal. Tidak adanya pemantauan yang terintegrasi menyebabkan kesulitan dalam menilai keberhasilan dan dampak dari program secara real-time. Misalnya, dalam pemantauan pada tahun 2020 dan 2021, meskipun ada laporan tentang penurunan prevalensi stunting, tidak ada data yang konsisten dan terupdate secara bersamaan di seluruh sektor yang terlibat. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem monitoring yang lebih terintegrasi untuk mengevaluasi efektivitas program dan memastikan pengambilan keputusan yang berbasis data. Sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi konvergensi di Kabupaten Aceh Jaya belum terintegrasi secara sistematis dan berkelanjutan. Tidak adanya pemantauan yang terintegrasi menyebabkan kesulitan dalam menilai keberhasilan dan dampak dari program secara real-time. Hal ini tercermin dalam laporan yang menunjukkan bahwa meskipun ada upaya monitoring, belum ada sistem pemantauan yang terpadu yang memungkinkan evaluasi real-time terhadap pelaksanaan program (Wibowo, 2021).

Penguatan kelembagaan Sekber Bangraja sebagai pusat koordinasi lintas sektor masih diperlukan. Artikel yang menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar semua pihak untuk mencapai target penurunan stunting, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan, menyarankan perbaikan kelembagaan untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting (Marwan, 2021). Penguatan koordinasi antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan masih menjadi prioritas utama dalam mengoptimalkan program stunting. Dalam laporan 2022, disebutkan bahwa koordinasi antar OPD perlu ditingkatkan, terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Misalnya, pada tahun 2020, alokasi anggaran dari Dinas Sosial yang sebesar Rp10.791.050.000 tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh keluarga yang membutuhkan, karena ketidakselarasan antara kegiatan yang direncanakan dengan kebutuhan lapangan. Oleh karena itu, diperlukan forum koordinasi yang lebih kuat dan terstruktur untuk mendukung efektivitas program penurunan stunting.

Meskipun ada upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasi program stunting, tantangan struktural dan operasional masih ada. Artikel yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dapat membantu dalam pemantauan dan evaluasi program, namun masih diperlukan peningkatan kapasitas dan koordinasi antar pihak terkait, mencatat bahwa hambatan struktural ini perlu diatasi secara sistematis untuk meningkatkan efektifitas aksi konvergensi (Susilo, 2021). Meskipun Kabupaten Aceh Jaya telah membuat kemajuan dalam melaksanakan aksi konvergensi integrasi stunting, tantangan besar masih ada dalam hal koordinasi, penggunaan data, alokasi anggaran, dan partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada peningkatan kapasitas pengelolaan data, realokasi anggaran yang lebih fokus pada daerah dengan prevalensi stunting tinggi, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi. Dengan adanya komitmen yang lebih kuat dari seluruh pihak yang terlibat, diharapkan upaya penurunan stunting di Kabupaten Aceh Jaya dapat lebih efektif dan berdampak jangka panjang.

METODE

Metode kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena efektifitas aksi konvergensi integrasi stunting di Kabupaten Aceh Jaya. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif tentang proses, dinamika, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2014) dalam *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, seperti pejabat pemerintah daerah, petugas kesehatan, tokoh masyarakat, dan pelaku program CSR. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan pelaksanaan program, dan statistik prevalensi stunting yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Untuk menganalisis data secara sistematis, digunakan metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang merupakan alat penting dalam manajemen strategis dan pengambilan keputusan (Helms & Nixon, 2010). Metode SWOT ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan program, serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang mempengaruhi efektifitas program konvergensi stunting. Proses analisis dimulai dengan pengumpulan dan pengelompokan data berdasarkan empat komponen SWOT, lalu dilanjutkan dengan sintesis temuan untuk merumuskan strategi yang dapat memperbaiki pelaksanaan program. Pendekatan ini sesuai dengan panduan analisis SWOT yang dijelaskan oleh Gurel dan Tat (2017) dalam jurnal *Journal of International Social Research*, yang menekankan pentingnya integrasi data kualitatif untuk memberikan gambaran holistik kondisi organisasi atau program.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, data wawancara dan dokumen dikodekan secara terbuka untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan faktor-faktor internal dan eksternal. Kedua, data yang sudah dikodekan dikelompokkan sesuai dengan kategori SWOT untuk memudahkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ketiga, hasil pengelompokan

tersebut dianalisis secara kritis untuk memahami hubungan antar faktor dan implikasinya terhadap keberhasilan program. Teknik triangulasi data juga digunakan untuk meningkatkan validitas hasil penelitian dengan membandingkan data dari berbagai sumber. Dengan demikian, metodologi ini tidak hanya menggambarkan kondisi saat ini secara rinci tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk rekomendasi strategis berbasis bukti guna meningkatkan efektivitas penanggulangan stunting di Kabupaten Aceh Jaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Faktor-Faktor Strategis

Faktor internal adalah elemen-elemen yang berada di dalam kendali Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Memahaminya secara jujur adalah kunci untuk mengetahui aset apa yang bisa dimanfaatkan dan kekurangan apa yang harus segera diperbaiki.

A. Kekuatan (Strengths)

Kekuatan adalah atribut positif internal yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan penurunan stunting.

1. Dukungan Politik dan Komitmen Kuat Pemerintah Daerah (S1): Terdapat komitmen yang jelas dari pimpinan daerah (Bupati dan jajarannya) untuk menjadikan penurunan stunting sebagai prioritas utama. Komitmen ini bukan hanya retorika, melainkan telah diwujudkan dalam bentuk alokasi anggaran awal dan perhatian khusus. Ini adalah modal sosial-politik paling berharga yang dapat menjadi daya penggerak utama untuk memobilisasi seluruh sumber daya.
2. Adanya Forum Koordinasi Formal (Sekber Bangraja) (S2): Secara kelembagaan, Kabupaten Aceh Jaya telah memiliki wadah koordinasi lintas sektor melalui Sekretariat Bersama Bangkit Generasi Aceh Jaya (Sekber Bangraja). Eksistensi forum ini adalah sebuah kekuatan karena fondasi untuk kolaborasi telah diletakkan. Masalahnya bukan lagi "menciptakan" wadah, melainkan "mengoptimalkan" wadah yang sudah ada.
3. Ketersediaan Alokasi Anggaran Awal dan Sumber Daya Manusia (S3): Telah ada alokasi anggaran spesifik untuk stunting yang tersebar di berbagai OPD, serta ketersediaan tenaga kesehatan dan kader di lapangan. Artinya, program tidak dimulai dari nol. Sumber daya (baik finansial maupun manusia) telah ada, meskipun distribusinya perlu disempurnakan.
4. Adopsi Awal Teknologi untuk Monitoring (S4): Pemanfaatan aplikasi seperti e-PPGBM menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah terbuka terhadap penggunaan teknologi dalam program kesehatan. Ini menjadi kekuatan karena ada dasar untuk pengembangan sistem informasi dan monitoring yang lebih terintegrasi di masa depan.

B. Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan internal yang dapat menghambat pencapaian tujuan.

1. Koordinasi Antar Sektor yang Bersifat Sektoral dan Belum Optimal (W1): Ini adalah kelemahan paling fundamental. Meskipun Sekber Bangraja ada, praktiknya masih menunjukkan ego sektoral yang kuat. Setiap OPD cenderung menjalankan programnya sendiri-sendiri, mengakibatkan tumpang tindih, adanya area yang tidak tersentuh (blank spot), dan inefisiensi anggaran. Mekanisme kerja dalam forum koordinasi belum mampu "memaksa" terjadinya integrasi dalam perencanaan dan penganggaran.
2. Pemanfaatan Data 1.000 HPK yang Rendah untuk Perencanaan (W2): Data sasaran (by name by address) keluarga berisiko stunting dan data 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sudah mulai terkumpul, namun belum menjadi satu-satunya rujukan dalam merancang intervensi. Perencanaan program seringkali masih bersifat umum dan tidak didasarkan pada analisis data yang tajam, menyebabkan intervensi menjadi tidak tepat sasaran.
3. Distribusi Layanan Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif yang Belum Merata (W3): Sebagai akibat langsung dari lemahnya koordinasi dan perencanaan, distribusi layanan menjadi timpang. Daerah dengan prevalensi stunting tinggi justru bisa jadi kekurangan akses layanan, sementara daerah lain mungkin menerima intervensi yang berlebihan.
4. Partisipasi Aktif Masyarakat yang Masih Rendah (W4): Program yang berjalan secara terfragmentasi dari berbagai OPD seringkali membingungkan masyarakat. Tidak adanya pesan tunggal dan gerakan bersama dari pemerintah menyebabkan tingkat kepemilikan (ownership) program di tingkat komunitas menjadi rendah. Faktor eksternal adalah elemen-elemen yang berada di luar kendali langsung Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, namun memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan program.

A. Peluang (Opportunities)

Peluang adalah faktor eksternal positif yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat program.

1. Dukungan Kebijakan Nasional yang Sangat Kuat (O1): Penurunan stunting adalah prioritas nasional yang dituangkan dalam berbagai Peraturan Presiden dan kebijakan kementerian. Ini membuka peluang untuk mendapatkan dukungan teknis, metodologi, pendanaan (APBN/DAK), dan arahan yang jelas dari pemerintah pusat. Aceh Jaya dapat menyelaraskan strateginya untuk "menangkap" peluang ini secara maksimal.
2. Kemajuan Pesat Teknologi Informasi dan Digitalisasi (O2): Perkembangan teknologi menyediakan berbagai alat yang dapat diadopsi untuk mengatasi

masalah koordinasi dan data. Platform digital, aplikasi mobile, sistem dasbor monitoring, dan grup komunikasi online adalah peluang untuk menciptakan sistem kerja yang lebih terintegrasi, transparan, dan real-time dengan biaya yang semakin terjangkau.

3. Peningkatan Kesadaran dan Tuntutan Masyarakat akan Kesehatan (O3): Secara umum, masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan dan gizi. Media sosial dan akses informasi yang mudah meningkatkan kesadaran ini. Ini adalah peluang karena masyarakat akan lebih reseptif terhadap program edukasi stunting dan lebih mungkin menuntut layanan yang berkualitas.
4. Potensi Kolaborasi dengan Sektor Swasta (CSR) dan Organisasi Non-Pemerintah (O4): Banyak perusahaan dan NGO yang memiliki program di bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan peluang ini dengan menawarkan skema kolaborasi yang jelas dan terkoordinasi, sehingga sumber daya eksternal dapat diarahkan untuk mendukung prioritas daerah.

B. Ancaman (Threats)

Ancaman adalah faktor eksternal negatif yang dapat membahayakan atau menghambat program.

1. Kondisi Geografis Wilayah yang Sulit Dijangkau (T1): Sebagian wilayah Kabupaten Aceh Jaya memiliki tantangan geografis (daerah terpencil, pegunungan) yang membuat distribusi logistik dan layanan kesehatan menjadi mahal dan sulit. Ancaman ini dapat menggagalkan program jika tidak diantisipasi dengan perencanaan yang sangat matang dan terkoordinasi.
2. Potensi Inkonsistensi Kebijakan Akibat Perubahan Politik (T2): Pergantian kepemimpinan di tingkat nasional maupun daerah dapat menyebabkan perubahan prioritas dan kebijakan. Program yang tidak dilembagakan secara kuat dalam sebuah kerangka hukum yang kokoh sangat rentan terhadap ancaman ini.
3. Keterbatasan Anggaran Negara dan Daerah dalam Jangka Panjang (T3): Meskipun saat ini ada alokasi anggaran, kondisi fiskal di masa depan tidak dapat dipastikan. Ketergantungan pada sumber pendanaan yang tidak stabil merupakan ancaman bagi keberlanjutan program. Hal ini menuntut efisiensi maksimal dalam penggunaan anggaran saat ini.
4. Tantangan Sosial Budaya dan Perilaku Masyarakat (T4): Masih adanya kepercayaan, mitos, dan kebiasaan turun-temurun terkait gizi ibu dan anak yang tidak sejalan dengan prinsip kesehatan modern merupakan ancaman yang signifikan. Mengubah perilaku adalah tantangan yang kompleks dan membutuhkan upaya komunikasi yang konsisten dan terpadu dari semua sektor.

Untuk melangkah lebih jauh dari sekadar identifikasi, kita perlu mengukur seberapa besar pengaruh setiap faktor terhadap keberhasilan program. Di sinilah kita

menggunakan Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE) dan Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE).

Metode ini membantu kita memberikan "bobot" (tingkat kepentingan) dan "rating" (seberapa baik kita meresponsnya) pada setiap faktor. Hasilnya adalah sebuah skor yang menunjukkan posisi strategis program secara terukur, memandu kita untuk fokus pada hal-hal yang paling krusial.

Analisis Faktor Internal (Matriks IFE): Mengukur Kekuatan Diri

Matriks IFE ini ibarat kita sedang "bercermin". Kita melihat secara jujur apa saja aset terbesar (kekuatan) yang kita miliki dan apa saja kekurangan paling fundamental (kelemahan) yang harus kita perbaiki dari dalam.

Setiap faktor diberi **bobot** (antara 0,0 hingga 1,0) yang menunjukkan seberapa penting faktor itu dalam upaya penurunan stunting. Total bobot dari semua faktor adalah 1,0. Kemudian, setiap faktor diberi **rating** (antara 1 hingga 4) yang menggambarkan kondisi saat ini:

- » Rating 4: Kekuatan yang sangat besar.
- » Rating 3: Kekuatan yang bersifat minor (biasa saja).
- » Rating 2: Kelemahan yang bersifat minor.
- » Rating 1: Kelemahan yang sangat besar dan mendasar.

ALTERNATIF PEMILIHAN KEBIJAKAN

Dari hasil pembahasan di atas, kedua strategi prioritas ini membangun sistem data terintegrasi (WO1) dan menciptakan mekanisme perencanaan bersama yang mengikat (WT1) saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

- ✚ Sistem data yang baik tidak akan ada gunanya jika tidak ada mekanisme koordinasi yang mewajibkan OPD untuk menggunakannya.
- ✚ Mekanisme koordinasi yang baik akan lumpuh jika tidak didukung oleh data yang akurat dan terintegrasi.

Oleh karena itu, kedua strategi ini harus dijalankan secara simultan di bawah satu payung kebijakan. Sebuah kebijakan yang mampu melembagakan kewajiban untuk berkoordinasi sekaligus mewajibkan penggunaan platform data tunggal. Ini membawa kita pada kesimpulan logis bahwa solusi yang dibutuhkan bukanlah sekadar program atau kegiatan baru, melainkan sebuah intervensi pada level sistem dan tata kelola.

Berdasarkan analisis SWOT yang menempatkan Kabupaten Aceh Jaya pada Kuadran III (Weaknesses-Threats), menjadi jelas bahwa intervensi yang dibutuhkan bersifat fundamental dan berfokus pada perbaikan tata kelola internal. Strategi prioritas yang dirumuskan mengarah pada satu kesimpulan: kita harus menciptakan

sebuah mekanisme yang mengikat untuk mengintegrasikan koordinasi, perencanaan berbasis data, dan penganggaran bersama.

Pertanyaannya sekarang adalah, "Instrumen kebijakan apa yang paling tepat untuk mewujudkan hal tersebut?" Untuk menjawabnya, kita akan menggunakan kerangka analisis kebijakan dari William Dunn, yang mengevaluasi setiap alternatif berdasarkan enam kriteria kunci untuk memastikan pilihan kita tidak hanya efektif, tetapi juga efisien, adil, dan dapat diimplementasikan.

Perumusan Alternatif Kebijakan

Berdasarkan kebutuhan untuk menciptakan "mekanisme yang mengikat", tiga alternatif instrumen kebijakan yang realistis dapat dirumuskan, dengan tingkatan kekuatan hukum dan kecepatan implementasi yang berbeda:

1. Alternatif 1: Penguatan Melalui Surat Edaran (SE) dan SOP.
 - ❖ Deskripsi: Bupati mengeluarkan Surat Edaran yang diperkuat dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru untuk Sekber Bangraja. Instrumen ini berisi himbauan dan panduan teknis bagi OPD untuk meningkatkan koordinasi dan berbagi data.
 - ❖ Sifat: Bersifat persuasif dan administratif.
2. Alternatif 2: Penguatan Kelembagaan Melalui Peraturan Bupati (Perbup).
 - ❖ Deskripsi: Bupati menerbitkan Peraturan Bupati khusus tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perbup ini secara hukum mewajibkan OPD untuk berkoordinasi melalui Sekber, mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran, serta menggunakan platform data tunggal. Perbup ini juga menetapkan peran, tanggung jawab, dan alur kerja yang jelas.
 - ❖ Sifat: Bersifat regulatori dan mengikat di level eksekutif.
3. Alternatif 3: Pelembagaan Permanen Melalui Peraturan Daerah (Perda).
 - ❖ Deskripsi: Pemerintah Daerah bersama DPRK merancang dan mengesahkan sebuah Peraturan Daerah. Perda ini memberikan landasan hukum yang paling kuat dan permanen untuk program konvergensi stunting, lengkap dengan alokasi anggaran multi-tahun dan sanksi.
 - ❖ Sifat: Bersifat legislatif dan mengikat secara permanen.

Evaluasi Alternatif Kebijakan dengan Kriteria William Dunn

Kini kita akan membandingkan ketiga alternatif tersebut secara head-to-head menggunakan enam kriteria Dunn.

Tabel 5. Matriks Evaluasi Alternatif Kebijakan

Kriteria	Alternatif 1:	Alternatif 2:	Alternatif 3:
----------	---------------	---------------	---------------

	SE & SOP	Peraturan Bupati (Perbup)	Peraturan Daerah (Perda)
<p>1. Efektivitas (Kemampuan mencapai tujuan inti: memaksa koordinasi)</p>	<p>Rendah. Himbauan dan panduan tidak cukup kuat untuk membongkar ego sektoral yang sudah mengakar.</p>	<p>Sangat Tinggi. Sebagai perintah langsung dari kepala daerah, Perbup memiliki kekuatan hukum untuk "memaksa" OPD patuh dan mengubah proses bisnis internal mereka.</p>	<p>Sangat Tinggi. Memberikan kekuatan hukum tertinggi dan paling permanen.</p>
<p>2. Efisiensi (Hasil yang didapat vs. sumber daya yang dikeluarkan)</p>	<p>Sangat Tinggi. Sangat cepat dan murah untuk dibuat, hanya membutuhkan sumber daya internal yang minimal.</p>	<p>Tinggi. Proses Penyusunannya relatif cepat (tidak perlu persetujuan legislatif) dan tidak memakan biaya besar, namun dampaknya sangat signifikan.</p>	<p>Rendah. Membutuhkan waktu yang sangat lama (berbulan-bulan hingga tahunan), biaya konsultasi publik, dan energi politik yang besar untuk pembahasan dengan DPRK.</p>

<p>3. Kecukupan (Seberapa besar masalah yang dapat diselesaikan)</p>	<p>Rendah. Hanya akan menyentuh permukaan masalah. Tidak mampu menyelesaikan akar masalah koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran.</p>	<p>Tinggi. Mampu menyelesaikan sebagian besar masalah inti: memaksa koordinasi, mengintegrasikan perencanaan, dan mewajibkan penggunaan data.</p>	<p>Sangat Tinggi. Mampu menyelesaikan seluruh masalah secara komprehensif dan melembagakannya untuk jangka panjang.</p>
<p>4. Pemerataan (Equity) (Distribusi manfaat & biaya yang adil)</p>	<p>Rendah. Tidak menjamin alokasi sumber daya akan bergeser ke wilayah stunting tinggi. OPD tetap bisa memprioritaskan wilayah "mudah".</p>	<p>Tinggi. Perbup dapat secara eksplisit mewajibkan alokasi sumber daya berbasis data prevalensi, sehingga memastikan keadilan bagi wilayah yang paling membutuhkan.</p>	<p>Sangat Tinggi. Mengunci prinsip pemerataan berbasis data ke dalam produk hukum jangka panjang.</p>

<p>5. Responsivitas (Memenuhi kebutuhan mendesak para pemangku kepentingan)</p>	<p>Rendah. Tidak menjawab kebutuhan akan adanya kerangka kerja yang kuat dan mengikat. Terkesan sebagai solusi "biasa saja".</p>	<p>Sangat Tinggi. Merupakan respons yang paling cepat dan tepat terhadap hasil diagnosis SWOT. Memberikan solusi yang kuat dalam waktu yang singkat, sesuai kebutuhan mendesak di lapangan.</p>	<p>Sedang. Meskipun menjawab kebutuhan, jeda waktu yang panjang dalam proses pembuatannya mengurangi tingkat responsivitasnya terhadap masalah yang butuh penanganan segera.</p>
<p>6. Kelayakan (Appropriateness) (Kelayakan politik, hukum, dan administratif)</p>	<p>Sangat Tinggi. Sangat mudah dan layak untuk dilakukan kapan saja.</p>	<p>Sangat Tinggi. Penerbitan Perbup adalah kewenangan penuh Bupati dan merupakan instrumen yang lazim digunakan untuk mengatur teknis pemerintahan. Sangat layak</p>	<p>Tinggi. Layak secara politik (ada komitmen kuat), namun prosesnya yang panjang dan melibatkan banyak aktor membuatnya lebih kompleks dibandingkan Perbup.</p>

		secara politik dan hukum.	
SKOR TOTAL	12	23	19
(Penilaian: 1=Rendah, 2=Sedang, 3=Tinggi, 4=Sangat Tinggi)			

Hasil evaluasi sistematis di atas menunjukkan bahwa Alternatif 2: Penguatan Kelembagaan Melalui Peraturan Bupati (Perbup) muncul sebagai pilihan kebijakan yang paling unggul dan strategis dengan skor tertinggi (23).

Rekomendasi Utama:

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya direkomendasikan untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi.

Justifikasi Pemilihan:

Peraturan Bupati (Perbup) adalah pilihan yang paling logis dan faktual karena ia menawarkan keseimbangan terbaik di antara semua kriteria:

1. Sangat Efektif dan Cukup: Perbup memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk membongkar ego sektoral dan memaksa perubahan perilaku OPD, sehingga langsung menasar pada akar masalah (Efektivitas & Kecukupan).
2. Sangat Efisien dan Responsif: Dibandingkan Perda, Perbup dapat diterbitkan dalam waktu yang jauh lebih singkat dan dengan biaya minimal. Ini menjadikannya solusi yang paling responsif terhadap kebutuhan mendesak untuk memperbaiki tata kelola program (Efisiensi & Responsivitas).
3. Sangat Layak (Feasible): Penerbitan Perbup berada dalam kewenangan penuh eksekutif, tidak memerlukan proses politik yang rumit dengan legislatif, sehingga menjadikannya instrumen yang paling mungkin diimplementasikan dalam waktu dekat (Kelayakan).

Mengapa Alternatif Lain Kurang Dipilih?

- ❖ Alternatif 1 (SE & SOP) dinilai terlalu lemah. Ia tidak akan mampu mengubah status quo dan hanya akan menjadi dokumen administratif tanpa dampak signifikan.
- ❖ Alternatif 3 (Perda), meskipun secara teori paling kuat, dinilai tidak efisien dan kurang responsif untuk kondisi saat ini. Menunggu Perda selesai sama dengan membiarkan masalah koordinasi berlarut-larut lebih lama. Namun, Perda bukanlah ide yang buruk. Ia dapat diposisikan sebagai tujuan jangka panjang, yaitu untuk melembagakan secara permanen praktik-praktik baik yang telah berhasil diimplementasikan dan diuji coba melalui Perbup.

Dengan demikian, rekomendasi ini tidak hanya didasarkan pada analisis SWOT, tetapi juga telah diuji secara ketat melalui kerangka kerja kebijakan publik yang mapan, menghasilkan sebuah solusi yang kuat, logis, faktual, dan yang terpenting, dapat segera diimplementasikan untuk membawa perubahan nyata di Kabupaten Aceh Jaya.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan serangkaian analisis yang mendalam, mulai dari identifikasi masalah prioritas menggunakan USG, pemetaan kondisi melalui SWOT, hingga evaluasi alternatif menggunakan kriteria William Dunn, kajian ini sampai pada satu kesimpulan yang kuat dan logis. Solusi untuk mengatasi kelemahan fundamental dalam program penurunan stunting di Kabupaten Aceh Jaya bukanlah sekadar menambah program atau anggaran, melainkan melakukan intervensi pada level tata kelola dan sistem kerja.

Oleh karena itu, direkomendasikan sebuah kebijakan yang bersifat regulatori, mengikat, dan dapat diimplementasikan secara cepat untuk menciptakan perubahan yang sistemik.

Merekomendasikan kepada Bupati Aceh Jaya untuk segera Menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Aceh Jaya.

Kebijakan ini adalah kewenangan penuh Kepala Daerah (Bupati) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Instrumen ini tidak memerlukan persetujuan legislatif (DPRK), sehingga menjadikannya alat kebijakan yang paling cepat dan responsif untuk mengatur urusan internal pemerintahan.

Dengan Kebijakan ini yang memiliki kekuatan logis, Perbup didasarkan pada hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa instrumen ini menawarkan keseimbangan terbaik antara efektifitas (cukup kuat untuk memaksa perubahan) dan efisiensi (cepat dan murah untuk dibuat). Ia secara langsung menyerang akar masalah yang teridentifikasi, yaitu lemahnya koordinasi, tanpa harus menunggu proses legislasi Perda yang panjang dan memakan waktu.

Substansi dan Muatan Pokok Peraturan Bupati

Untuk memastikan Perbup ini benar-benar menjadi alat pemaksa sinergi yang efektif, ia harus memuat setidaknya empat pilar pengaturan utama yang bersifat wajib dan mengikat bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Yaitu:

Pilar 1: Penguatan Kelembagaan dan Mekanisme Koordinasi Wajib

Perbup ini harus secara eksplisit mengubah Sekber Bangraja dari forum yang bersifat sukarela menjadi sebuah mesin kerja yang memiliki mandat hukum.

Pilar 2: Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Data Tunggal

Ini adalah jantung dari Perbup yang bertujuan untuk membongkar ego sektoral dalam pengelolaan anggaran.

Pilar 3: Platform Monitoring dan Evaluasi Terpadu

Perbup ini harus menjadi landasan hukum untuk membangun sistem monitoring digital yang menjadi alat kerja bersama.

Pilar 4: Sistem Insentif dan Disinsentif

Untuk memastikan kepatuhan, Perbup harus mengandung mekanisme penghargaan dan konsekuensi yang jelas.

Dengan mengimplementasikan Peraturan Bupati yang memuat keempat pilar ini, Kabupaten Aceh Jaya tidak hanya akan memiliki program, tetapi sebuah sistem kerja terintegrasi yang dirancang untuk bergerak secara sinergis, efisien, dan fokus pada hasil. Ini adalah langkah paling logis dan strategis yang dapat diambil saat ini untuk mempercepat penurunan angka stunting secara signifikan dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Amalia, A., Fauzan, H., & Widiyanto, E. (2022). *Implementation of integrated stunting prevention actions in Aceh Jaya: A case study of service gaps and opportunities for improvement*. *Journal of Health Policy*, 12(3), 212-223.
- Bandura, A. (1986). *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Prentice-Hall.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Dahl, R. A. (1961). *Who Governs? Democracy and Power in an American City*. Yale University Press.
- Gurel, E., & Tat, M. (2017). SWOT Analysis: A Theoretical Review. *Journal of International Social Research*, 10(51), 994-1006. https://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi51pdf/gurel_ali.pdf

- Helms, M. M., & Nixon, J. (2010). Exploring SWOT analysis – where are we now? A review of academic research from the last decade. *Journal of Strategy and Management*, 3(3), 215-251. <https://doi.org/10.1108/17554251011064837>
- Hendrawan, A. (2022). *Monitoring and challenges in healthcare provision in rural Aceh: Addressing stunting issues*. *Journal of Rural Health*, 18(4), 255-263.
- Humaira, F., & Kala, I. (2023). Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penurunan Stunting di Kabupaten Aceh Jaya. *Transpublika International Research in Exact Sciences*, 10(2), 123-135. <https://ojs.transpublika.com/index.php/TIRES/article/view/1202>
- Lisma, M., & Ertika, S. (2022). Peran Dana Desa dalam Sektor Kesehatan untuk Penurunan Stunting di Kabupaten Aceh Jaya. *Jurnal Ilmiah Teunuleh*, 5(1). <https://teunulehjournal.com/index.php/jiteunuleh/article/download/96/70>
- Marwan, M. (2021). *Improving multi-sectoral coordination in stunting reduction programs: A focus on local governments*. *Indonesian Public Health Journal*, 14(2), 101-112.
- Nasution, D. (2021). *Assessing the effectiveness of regional policies in stunting reduction in Aceh Jaya: A focus on intergovernmental coordination*. *Policy and Governance Review*, 8(2), 45-56.
- Nurdin, M., & Muhammad, A. (2022). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Mengurangi Angka Stunting di Kabupaten Aceh Jaya. *International Journal of Advances in Social Sciences and Humanities*, 4(2), 220-234.
- Sari, T. (2021). *Allocation and distribution of health budget for stunting in Aceh Jaya: A case study*. *Journal of Public Budgeting*, 15(1), 34-46.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Setiawati, Y., & Nasution, M. (2020). *Behavioral change and community participation in stunting prevention: A case study from Aceh Jaya*. *Community Health Journal*, 10(1), 102-114.
- Supriyanto, H. (2021). *Implementation outcomes of convergence action policy to accelerate interventions for reducing stunting in Indonesia*. *Journal of Nutrition Policy*, 22(3), 178-189.
- Susilo, R. (2021). *Structural barriers in stunting intervention programs in rural areas: The Aceh case*. *Journal of Development Studies*, 9(2), 133-145.
- Wahyudi, A. (2020). *Data science application in stunting convergence: Case study from Aceh*. *Indonesian Journal of Data Science*, 8(2), 98-110.
- Wibowo, K. (2021). *Monitoring systems for stunting programs: Lessons from Aceh Jaya*. *Journal of Public Health and Monitoring*, 17(4), 287-299.
- Williamson, O. E. (1975). *Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications*. Free Press.
- World Commission on Environment and Development (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.